

## **PENERAPAN ACCESS CONTROL SEBAGAI SALAH SATU STRATEGI PENCEGAHAN KEJAHATAN SITUASIONAL DI LADANG MINYAK DURI**

**Muhammad Fauzan<sup>1</sup>**

*ojan.rafter@gmail.com*

### **Abstract**

*The objective of this research is to make an overview of the application of situational crime prevention strategies, focus in the application of access control, in Duri Field by PT. Chevron Pacific Indonesia. The research used qualitative method, so that the data obtained through the interview and direct observation to the location. The result of this research is the fact of the application of crime prevention strategies in the Duri Field that are not only confined by the physical aspects, but there are also the social and psychological aspects. The physical aspect of the access control concept would not be effective if the social and psychological aspects do not support them.*

*Keywords: Situational Crime Prevention Strategies, Access Control.*

UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, di sini jelas bahwa semua yang terkandung di dalam perut bumi Indonesia adalah milik Negara yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyatnya, tidak terkecuali minyak bumi. Minyak bumi Indonesia digali di ladang-ladang minyak produktif yang ada di Indonesia, salah satunya ladang minyak yang dikelola oleh PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) di provinsi Riau yaitu Ladang Minyak Duri atau lazim dikenal dengan Duri Field. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang sangat bermanfaat, oleh karena itu aset ini harus kita lindungi termasuk unit-unit produksinya. Namun PT. CPI mencatat lebih 500 persen peningkatan gangguan keamanan di ladang minyak *onshore* sejak reformasi bergulir ([www.riau.go.id](http://www.riau.go.id)). Peningkatan gangguan keamanan ini didominasi oleh kasus pencurian alat-alat produksi yang mengakibatkan terganggunya proses produksi minyak. Pada bulan Maret hingga bulan Mei 2010 Departemen *Security* PT. CPI mencatat telah terjadi

---

<sup>1</sup> Alumni program Sarjana Reguler Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

15 kasus pencurian pada rentang waktu tersebut, dan beberapa kasus pencurian adalah pencurian terhadap alat produksi yang masih terpasang (Departemen *Security* PT. CPI).

Dalam Keputusan Presiden nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan objek vital nasional, yang dimaksud dengan objek vital nasional pada pasal 1 ayat 1 adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Ladang minyak Duri yang dikelola oleh PT CPI telah ditetapkan sebagai objek vital nasional yang harus dilindungi dalam Keputusan Menteri ESDM NO.1762K/07/MEM/2007. Di dalam Kepmen ESDM NO.1762 K/07/MEM/2007 pada diktum keempat menjelaskan sebagai berikut; pengelola obyek vital nasional sektor ESDM sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengamanan internal obyek vital nasional masing-masing. Dengan ini jelas bahwa pengamanan ladang minyak menjadi tanggung jawab pengelola juga, tidak sepenuhnya oleh polisi. Sebagai sebuah objek vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, hendaknya ladang minyak harus dilindungi dengan sebuah strategi pencegahan kejahatan situasional.

Telah banyak sarjana yang menjadikan Strategi pencegahan kejahatan terutama pada kejahatan situasional sebagai perhatian utamanya dalam penelitian mereka. Dalam penelitian yang berjudul *Situational Crime prevention: Its Theoretical Basis and Practical Scope* yang dilakukan oleh Clarke membahas mengenai teori dari *situational crime prevention* yang merupakan teori yang penulis gunakan dalam tulisan ini. Fokus penelitian ini menjelaskan mengenai teori pencegahan kejahatan situasional dan penerapannya. Dalam penelitiannya Clarke mengatakan bahwa pencegahan kejahatan situasional ditujukan untuk kejahatan yang spesifik dan melibatkan manajemen, desain, atau manipulasi lingkungan secara sistematis dan permanen sehingga akan mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan. Teori ini dikemukakan oleh Clarke sebagai teori alternatif untuk pencegahan kejahatan yang lebih menitik beratkan faktor-faktor situasional dan cara-cara yang diperhitungkan pelaku potensial.

Pencegahan kejahatan adalah salah satu cara untuk mengurangi angka kejahatan. Pencegahan kejahatan menurut O'Block:

*“Crime prevention has been discribed as “any organized activity aimed at keeping unlawful behavior from occurring originally or keeping such behavior to a minimum and thus avoiding police intervention; or any organized activity aimed at deterring unlawful behavior”.*

(Terjemahan bebas: Semua tindakan yang terorganisir yang mengarah kepada menjaga terjadinya perilaku yang tidak sah atau menekan beberapa perilaku seminim mungkin dengan menghindari intervensi dari polisi atau mencegah terjadinya perilaku yang tidak sah)". (1981: hal 5)

Dalam bahasa singkatnya Vester Mark dan Blauvelt mengatakan pencegahan kejahatan adalah mengurangi probabilitas kejahatan (O'Block, 1981: hal 5). Menurut Ray pencegahan kejahatan mempunyai beberapa karakteristik (1977: hal37):

1. Pencegahan kejahatan harus di atur atau di rancang sebelum kejahatan terjadi bukan setelah kejahatan terjadi
2. Pencegahan kejahatan harus fokus pada pengaturan perilaku secara langsung
3. Pencegahan kejahatan harus fokus pada lingkungan mana yang kemungkinan akan terjadi kejahatan, dan juga interaksi lingkungan dan orang-orang yang ada dilingkungan tersebut
4. Pencegahan kejahatan adalah sebuah hasil dari berbagai macam disiplin ilmu terutama yang berhubungan dengan perilaku manusia
5. Pencegahan kejahatan itu lebih murah biayanya dan efektif ketimbang penghukuman dan pengobatan.

Pendekatan situasional dalam pencegahan kejahatan merupakan pendekatan yang melihat konteks dimana kejahatan itu terjadi. Fokus utama dari pendekatan situasional adalah upaya mengurangi kesempatan seseorang atau kelompok dalam melakukan kejahatan. Menurut pendekatan ini tindakan kejahatan dilakukan oleh orang-orang yang bertingkah laku rasional, tetapi berada dalam tekanan-tekanan khusus dan cenderung untuk mempergunakan kesempatan yang ada (Dermawan, 1994: hal 85-86). Pencegahan kejahatan melalui pendekatan situasional memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah jangka yang lebih pendek untuk mencegah pelanggaran yang lebih khusus (*ibid*: hal 67).

Sedangkan menurut Ronald V Clarke pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional adalah:

*"defined as comprising, opportunity-reducing measure that are :*

1. *directed at highly specific forms of crime*
2. *involve the management, design or manipulation of the immediate environment in as systemic and permanent way as possible*

3. *make crime more difficult and risky, or less rewarding and excusable as judged by a wide range of offender”*

(terjemahan bebas: didefinisikan sebagai suatu alat pengurangan kesempatan yang merupakan :

1. di tujuan pada suatu kejahatan yang spesifik
2. meliputi manajemen, desain atau manipulasi dari lingkungan yang ada dengan cara yang sistematis dan sepermanen mungkin
3. membuat kejahatan lebih sulit dan lebih beresiko bila dilakukan, atau kurang menguntungkan dan kurang dapat di manfaatkan bila di nilai oleh pelaku) (Clarke,1997: hal 4)

Senada dengan Clarke, Hidensohn megatakan bahwa langkah-langkah pencegahan kejahatan secara situasional haruslah mencakup manajemen, desain, atau manipulasi lingkungan dimana kejahatan akan terjadi secara sistematis dan sepermanen mungkin mungkin (Hidensohn, 1989: hal 174). Terkait dengan kesempatan Boba menjelaskan hubungan antara kesempatan dengan kejahatan, menurut Boba kejahatan dapat dicegah dengan mengurangi kesempatan namun mengurangi kesempatan tidak selalu dapat mencegah terjadinya kejahatan tetapi dengan fokus terhadap pengurangan kesempatan dapat menghasilkan penurunan kejahatan secara lebih luas (Boba, 2005: hal 69). Clarke mengatakan langkah-langkah dalam pencegahan kejahatan secara situasional dibagi menjadi langkah untuk mengurangi kesempatan terjadinya kejahatan dan langkah meningkatkan kemungkinan tertangkapnya pelaku bila melakukan kejahatan (Muncie. *et.al*, 1996: hal 335). Sedangkan menurut Wels dan Farrington pencegahan kejahatan secara situasional dapat dilakukan dengan melakukan penilaian lingkungan, yang secara langsung membentuk sebuah persepsi dari para pelaku kejahatan potensial dengan meningkatkan resiko dan mengurangi apa yang akan didapat (Wels dan Farrington, 2006: hal 209).

Dalam teori *situational crime prevention* Clarke mengajukan 25 teknik pengurangan kesempatan kejahatan yang dibagi atas 5 klompok besar yaitu, ***increasing perceived effort, increasing perceived risk, reducing anticipated rewards, removing excuses, dan reduce provocation.*** Dalam tulisan ini penulis tidak akan mempergunakan keseluruhan dari 25 teknik ini, Penulis akan fokus melihat pada satu teknik yaitu akses control saja yang tergabung dalam kelompok *increasing perceived effort*. Sebelum penelitian ini telah ada sarjana lain yang telah melakukan penelitian terhadap *akses control*. Dalam tesisnya Julianto Santoso menggunakan teori pencegahan kejahatan dengan pendekatan situasional terutama dia berfokus pada satu bagian yaitu *akses control*. Menurut Julianto Santoso, selama ini

pemahaman tentang *access control* hanya sebatas rangkaian atau sistem peralatan yang dimanfaatkan untuk mengatur mobilitas manusia dalam satu area tanpa ada pengembangan yang mengarah pada organisasi yang menentukan perilaku, penentuan regulasi, dan tata laksana penarapannya.

Menurut James L. Humphrey (O'Block, 1981: hal 300) *access control* adalah merupakan konsep rancangan yang digunakan untuk mengurangi kesempatan terjadinya tindak kejahatan dengan cara meniadakan jalan masuk menuju target kejahatan dan membuat sebuah persepsi adanya resiko yang tinggi bila melakukan kejahatan terhadap target tersebut. Strategi ini diklasifikasikan atas tiga hal:

1. *Organized*, adalah pengelolaan terhadap satuan-satuan pengamanan atau sekelompok orang untuk kepentingan pencegahan keamanan. Dalam *organized* terdapat alur sistem kerja dan perintah. Contohnya resepsionis, atau satuan penjaga.
2. *Mechanical*, *mechanical* disini merupakan alat-alat (tools) yang dipergunakan untuk mencegah kejahatan *mechanical* disini lebih mengarah pada pengamanan yang berbentuk fisik contohnya adalah kunci, keamanan fisik lain seperti portal pagar, dan lainnya
3. *Natural*, merupakan suatu bentuk pendefinisian ruang melalui setting ruangan, sebuah prosedur peraturan dan pemanfaatan ruangan. Biasanya ruangan yang tidak bisa dimasuki sembarang orang biasa didefinisikan melalui adanya aturan yang tertulis bahkan setting ruangan yang pintunya selalu terkunci.

Selain itu *access control* juga bisa di definisikan sebagai berikut;

*“Is the management of who, goes where and when. Person are uniquely identified through specific identity and will able to enter only at assigned door and days or time.”*

(terjemahan bebas; merupakan pengelolaan tentang siapa, pergi kemana dan kapan. Seseorang secara unik diidentifikasi dengan identitas khusus dan hanya akan dapat masuk ke pintu tertentu pada waktu atau hari yang ditentukan) (*Inova user's guide*)

Dari definisi diatas terdapat 3 komponen yang perlu diperhatikan yaitu:

1. **Who**, yaitu orang atau pihak yang akan di berikan hak agar bisa memasuki area tertentu. *Access control* secara unik juga memberikan sebuah identitas pada setiap orang yang berkepentingan dan otoritas untuk memasuki fasilitas tertentu
2. **Where**, yaitu menentukan tempat yang dapat digunakan atau dimasuki oleh orang-orang yang memiliki kewenangan atau

kepentingan atas tempat tersebut. *Access control* kemudian mengelola keamanan orang-orang dapat pergi dengan memberikan akses kepintu gerbang *elevator* dan sarana-sarana jalan masuk yang ada

3. **When**, yaitu menentukan waktu kapan seseorang dapat memasuki ruang atau area tertentu dan juga dapat diartikan sebagai pencatatan aktifitas mobilitas orang-orang pada wilayah tertentu.

*Access control* tidak hanya di gunakan di dalam dunia *security* saja namun juga digunakan dalam dunia teknologi informasi yang mempunyai fungsi yang tidak jauh berbeda. Ada beberapa definisi *access control* dalam dunia IT, salah satunya:

*“Access control is a much more general way of talking about controlling access to web resource. Access can be granted or denied based on wide variety of criteria, such as the network address of the client, the time of day, the phase of the moon, or browser which the visitor is using. Access control is analougous to locking the gate at closing time, or only letting people onto the ride who are more than 48 inches tall- its controlling enterence by some arbitrary condition which may or may not have anything to do with the attributes of the particular visitor.”*

(terjemahan bebas: *Access control* dapat dikatakan secara umum sebagai mengendalikan jalan masuk ke sumber daya-ke sumber daya yang ada di jaringan. Akses dapat diterima atau ditolak berdasarkan kriteria yang beragam, seperti *network address* dari pengguna, waktu penggunaan, bulan, atau sarana (*browser*) yang digunakan oleh pengunjung. *Access control* secara analog mengunci gerbang pada waktu yang ditentukan atau memberikan jalan masuk bagi orang-orang yang memiliki tinggi 48 inci. Sistem ini mengendalikan pintu masuk dengan beberapa kondisi tertentu yang dimiliki atau tidak oleh pengunjung.) (<httpd.apache.org>)

Pemahaman diatas memperlihatkan bahwa pengendalian yang dimaksud merupakan pengendalian berupa pembatasan berdasarkan kebutuhan, kriteria, dan otoritas tertentu. *Access control* tidak hanya terbatas pada alat-alat fisik saja atau sebuah sistem elektronik saja tetapi juga terdapat muatan sosialnya juga. Muatan sosial ini sangatlah penting dalam usaha pencegahan kejahatan terutama dalam *access control*. Seperti yang di ungkapkan oleh Hoffmann bahwa kunci dan gembok tidak dapat mengendalikan akses secara memadai (Gallery, 1986: hal 295). Oleh karena itu apapun bentuknya

harus tetap bermuatan sosial psikologis, sehingga calon pelaku potensial akan memahami ada suatu perubahan situasi sosial psikologi sehingga ia akan menyadari bahwa dalam melakukan kejahatan akan semakin sukar. senada dengan hal tersebut Clarke dan John Eck mengatakan;

*“Almost all crime prevention involves changing offenders’ perceptions of the opportunity for crime.”*

(terjemahan bebas: hampir semua pencegahan kejahatan meliputi merubah persepsi adanya kesempatan dalam melakukan kejahatan para pelanggar). (Clarke dan Eck, 2003: hal 21)

Penelitian disusun berdasarkan pada pendekatan kualitatif, dengan studi kasus terhadap penerapan *access control* sebagai salah satu strategi pencegahan kejahatan yang di terapkan oleh PT CPI diladang minyaknya. Pendekatan kualitatif dipilih karena penulis ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai penerapan *access control* yang diterapkan oleh PT CPI di Duri *Field*. Penelitian ini dilakukan berdasarkan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana penerapan *access control* sebagai salah satu strategi pencegahan kejahatan situasional di ladang minyak Duri. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penulis bertujuan untuk memberikan gambaran tentang penerapan *access control* sebagai salah satu strategi pencegahan kejahatan situasional yang diterapkan oleh PT CPI di ladang minyak Duri. Dalam penelitian ini penulis berusaha untuk menggali data mengenai penerapan *access control* di ladang minyak Duri yang dilakukan oleh PT. CPI sebagaimana adanya. Hal tersebut dipaparkan kembali ke dalam tulisan ini untuk memberikan gambaran yang lengkap kepada pembaca mengenai penerapan *access control* sebagai salah satu strategi pencegahan kejahatan diladang minyak duri yang dilakukan oleh PT.CPI. Penelitian ini memilih PT CPI sebagai subjek penelitian. Data penelitian diperoleh dari data primer dan sekunder. Secara garis besar proses pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi lapangan, serta studi pustaka terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan. Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder, studi kepustakaan dilakukan dengan kajian mengenai pencegahan kejahatan secara situasional terutama konsep *access control*.

## **Strategi Pencegahan kejahatan dan Penerapan *Access control* di Ladang Minyak Duri**

### **SOP *Access control* di PT.CPI**

SOP adalah kebijakan perusahaan yang wajib dipenuhi dan diakui oleh pihak yang berkepentingan di PT.CPI. Pada dasarnya telah terdapat SOP *access control* di PT.CPI, SOP tersebut termasuk kedalam sebuah *fundamental safe work practices* dimana biasa disingkat menjadi FSWP. FSWP adalah sebuah kebijakan perusahaan dibidang keselamatan kerja. Dalam SOP *access control* yang dimiliki PT.CPI mencantumkan beberapa hal seperti tujuan, ruang lingkup, definisi khusus, proses dalam bentuk bagan, infrastruktur yang dibutuhkan, pelaksanaan yang berisikan kompetensi dari beberapa pihak yang memiliki kepentingan. Tujuan dari *access control* dalam SOP ini adalah Proses *access control* ditunjuk untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan punya alasan yang absah, terkait dengan operasi dan bisnis, mendapatkan ijin, dan memahami dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk masuk fasilitas operasi yang dapat memasuki dan/atau bekerja di dalam fasilitas. Hal ini dimaksudkan agar keselamatan dan keamanan operasi fasilitas, dan orang-orang yang berda di dalamnya dapat terjamin. Dalam tujuannya, jelas *access control* yang dimaksud berfungsi untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan punya alasan absah yang dapat memasuki wilayah operasi PT.CPI. Ini merupakan sebuah fungsi pengawasan dari *access control*, namun dalam SOP ini tidak mencantumkan fungsi pengaturan siapa saja yang boleh/ diizinkan masuk kedalam wilayah PT.CPI.

Dalam SOP ini tidak mencantumkan kriteria dan alasan yang absah apa dan siapa saja yang berhak masuk. Dalam proses ini tidak dijelaskan bagaimana prosedur untuk mendapatkan *badge* pegawai PT.CPI, prosedur untuk pembuatan dan mendapatkan *badge* pegawai BP dari PT.CPI, prosedur untuk mendapatkan *visitor pass*, prosedur untuk mendapatkan *vehicle pass*, yang notabene adalah alat untuk menentukan kriteria memasuki wilayah PT.CPI. Ini dikarenakan SOP ini masih terbatas untuk pelaksanaan proses keselamatan dan keamanan kerja dari pegawai.

Proses *access control* ini berlaku bagi semua fasilitas operasi yang ada di dalam area IBU, termasuk kepada: CGS, CSS, *Test Station* and *CVC Station*, dan Operasi Rig. Proses ini juga berlaku bagi semua orang yang terlibat sebagai pelaksana *access control*, *Facility Owner*, *Supporting Team*, *Business Partner*, Tamu, dan *Security*. Proses ini tidak mencakup rincian prosedur yang terkait dengan proses *access control* seperti proses *Work Permit*, karena rincian tersebut di jelaskan pada bagian tersebut. Yang perlu



digaris bawahi dari ruang lingkup proses *access control* pada SOP ini adalah proses ini hanya berlaku untuk fasilitas operasi yang berada pada area PT.CPI dengan kata lain proses ini tidak mencakup proses *access control* untuk memasuki area PT.CPI. Contohnya, SOP ini merupakan prosedur/proses *access control* untuk memasuki CGS 1 diwilayah Duri field, namun SOP ini tidak mencakup proses *access control* untuk memasuki wilayah Duri field itu sendiri. Semua uraian ini bisa dilihat dari infrastruktur yang harus ada dalam proses *access control*. Pada infrastruktur tidak mencantumkan *vehicle pass* dan *visitor vehicle pass* sebagai bagian dari infrastruktur itu sendiri. Dan juga bisa dilihat dari proses *access control* itu sendiri, pada bagian proses terdapat *facility owner* yang notabene adalah orang yang bertanggung jawab atas fasilitas tersebut. Dalam proses tersebut semua orang diharuskan untuk mengisi buku tamu atau daftar kehadiran. Untuk memasuki sebuah area tidak terdapat proses tersebut.

Untuk kepentingan administratif dan kepastian mutu proses penerapan *access control* diperlukan dokumen pendukung untuk memastikan berjalannya proses acces control tersebut dan mempermudah pengawasan dari hasil pencatatan yang dilakukan. Pada SOP *access control* yang dimiliki PT.CPI hanya mencantumkan *log book*, *FSWP performance assesment* dan *FSWP behavior observation* sebagai dokumen yang harus didokumentasikan. Pada dasarnya *FSWP performance assesment* dan *FSWP behavior observation* adalah dokumen untuk menilai dan mengawasi penerapan keselamatan dan keamanan kerja, bukan untuk kepentingan keamanan fasilitas dari ancaman kejahatan. Ada dokumen-dokumen lain yang seharusnya terdapat pada SOP ini, seperti lembar pengajuan *vehicle pass*, *form* permintaan *badge* karyawan, *form* permintaan *badge* karyawan yang hilang, alur permintaan dan *form* pengajuan *badge* BP dan *visitor pass*, *log book* keluar masuk barang, *form* harian terjadinya pelanggaran, *form* laporan kejadian, *form* tanda bukti penahanan barang. Berbagai dokuman diatas digunakan tidak hanya untuk kepastian berlakunya SOP *access control* ini semata, tetapi juga berfungsi sebagai media pengawasan dan penetapan kriteria jalan masuk yang akan diberikan. Contohnya akan diketahui siapa saja pegawai BP yang bekerja di Duri field secara umum dan di sebuah fasilitas secara khusus bila ada dokumentasi *form* pengajuan *badge* BP yang ditandatangani oleh *company representative* yang membawahi BP tersebut, *company representative* dari security yang memegang wilayah Duri field dan *project manager* BP tersebut. Dengan demikian akan lebih mudah mengawasi pergerakan, mobilitas, lalu-lalang, keluar-masuk pegawai BP yang kerja diwilayah tersebut. Atau hanya orang dengan kriteria tamu yang terdapat di SOP *access control* yang bisa

memasuki wilayah Duri *field* dan fasilitas-fasilitas yang terdapat didalamnya.

### **Sarana Fisik *Access control* di Wilayah Duri *Field***

Penerapan *access control* memerlukan sarana fisik untuk menunjang efektifitas pengamanan untuk wilayah yang dijaga. Sarana fisik memainkan peranan yang cukup penting untuk mendukung terlaksananya sebuah program pengamanan. Ini terlihat dari konsep *access control* yang dikembangkan oleh Clarke yang memasukkan poin halang-rintang berbentuk fisik kedalam konsep tersebut. Ada beberapa sarana fisik yang dimiliki oleh PT.CPI untuk penerapan proses *access control* di wilayah Duri *field*, antara lain:

- a. Gerbang pintu utama; gerbang pintu utama adalah sarana berupa penghalang fisik dengan kemampuan menghambat dan menahan jalan masuk secara paksa ke dalam areal Duri *field*, gerbang utama adalah jalan masuk utama yang digunakan untuk memasuki wilayah Duri *field*. Gerbang pintu utama atau yang lazim disebut *gate* untuk wilayah Duri *field* terdapat lima *gate*, yang antara lain *gate* 125, *gate* 116, *gate* 117, *gate* 128 dan *gate* 126. *Gate* 116, *gate* 117 dan *gate* 125 merupakan *central gate* dimana semua lalu lintas keluar-masuk barang hanya diperbolehkan pada *gate-gate* tersebut, selain barang semua tamu yang berkunjung ke wilayah Duri *field* hanya diperbolehkan melalui *gate-gate* tersebut. Sedangkan *gate* 126 dan *gate* 128 adalah *gate* khusus yang hanya di pergunakan untuk keluar masuk pegawai PT.CPI dan BP nya yang menggunakan kendaraan operasional PT.CPI ataupun kendaraan yang memiliki *pass* ladang minyak. Lalu lintas keluar masuk barang dan tamu tidak diperkenankan di *gate* ini. Pada *gate* 128 pintu gerbang selalu tertutup dan terkunci, ini dikarenakan *gate* 128 adalah *gate* yang sangat dekat dengan proyek NDD yang merupakan proyek yang dikategorikan penting oleh PT.CPI sehingga wilayah NDD adalah wilayah vital yang tertutup. Penutupan *gate* 128 ini memunculkan sebuah persepsi bahwa wilayah utara Duri *field* adalah wilayah tertutup yang dijaga dengan ketat. Pada ketiga *central gate* gerbang selalu dibuka 24 jam kecuali *gate* 116 yang ditutup pada pukul 12 malam dan buka pada pukul 5 pagi. Dengan dibukanya *gate* 117 dan 125 selama 24 jam maka dibutuhkan sebuah penjagaan dan penerapan petunjuk pelaksanaan kerja secara ketat dan konsisten agar memunculkan persepsi bahwa walaupun *gate* itu selalu terbuka namun memiliki resiko yang sangat tinggi untuk menerobos *gate* tersebut karena penjagaan yang ketat.

- b. Portal halang kendaraan; berupa penghalang fisik yang dapat dibuka atau ditutup untuk menghalangi bahkan menghentikan orang atau kendaraan yang masuk. Tidak hanya sebagai penghalang namun portal merupakan sebuah simbol bahwa hanya orang-orang tertentu, dan barang-barang tertentu yang dapat memasuki wilayah tersebut. Simbol ini menandakan bahwa untuk memasuki areal *Duri field* dan fasilitas-fasilitasnya diperlukan izin dari pihak yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan izin. Untuk fasilitas-fasilitas yang vital terdapat portal yang dioperasikan oleh petugas *security* yang menjaga wilayah tersebut. Portal ini selalu tertutup, dan dibuka bila sebuah kendaraan atau orang telah diizinkan untuk memasuki wilayah tersebut. Ini memunculkan sebuah persepsi bahwa ada kriteria tertentu dan izin tertentu untuk memasuki fasilitas tersebut. Pada *gate* 117 dan 125 terdapat portal penghalang namun tidak dipergunakan dengan alasan ramainya lalu-lintas keluar masuk kendaraan. Ketidakbergunaan portal ini memunculkan persepsi bahwa siapa saja bisa memasuki wilayah *Duri field* melalui *gate* tersebut. Untuk mencegah itu, dibutuhkan personil untuk memeriksa setiap kendaraan yang masuk dengan teliti.
- c. *Metal detector* dan kaca pencari bom; ini merupakan sarana fisik untuk menginspeksi orang, kendaraan dan barang yang memasuki wilayah *Duri field* dan fasilitas-fasilitas di dalamnya. Alat ini ditujukan untuk mencari barang-barang yang tidak diperkenankan masuk ke dalam *Duri field* dan fasilitas-fasilitas didalamnya. Namun pada penerapannya alat ini dipergunakan secara tidak konsisten, sehingga muncul persepsi bahwa penjagaan wilayah *Duri field* tidak menginspeksi orang, barang dan kendaraan dengan alat ini dan juga muncul persepsi bahwa resiko ketahuan bila membawa barang-barang terlarang masuk ke dalam *Duri field* sangat kecil.
- d. Rambu lalu-lintas dan tanda aturan; ini merupakan simbol dari aturan yang berlaku di *Duri field*. Rambu lalu-lintas dan tanda aturan menyampaikan pesan tentang keteraturan dan ketertiban yang perlu dipenuhi oleh semua orang yang memasuki wilayah tersebut. Jadi dengan adanya rambu lalu-lintas ini dan tanda aturan memunculkan sebuah persepsi untuk memasuki wilayah tersebut harus menaati aturan yang ada, seperti pada contoh terdapat tanda aturan yang berisi "*No pass, No badge, No entry*" pesan ini menyampaikan bahwa bila sebuah kendaraan tidak memiliki *pass* dan pengemudinya tidak memiliki *badge* maka tidak diizinkan masuk kedalam wilayah *Duri field*. persepsi yang muncul dari pesan ini tidak sembarang orang dan kendaraan yang bisa memasuki wilayah *Duri field*.

- e. Pos penjagaan; pos penjagaan berupa sarana/ tempat petugas *security* melakukan tugas penjagaan, pengawasan pada penerapan proses *access control*. Pos merupakan sebuah simbol terdapatnya proses penjagaan dan terdapatnya personil *security* yang menjaga wilayah tersebut. Pos-pos yang terdapat pada *gate* biasanya dilengkapi dengan fasilitas telephone, AC, toilete, dan sebuah ruangan. Pada *gate* 125 pos penjagaannya adalah pos semi permanen karena pos permanennya sedang di renovasi. Pada pos *gate* ini tidak terdapat telephone sehingga bila ada tamu datang yang melalui *gate* ini tidak bisa dikonfirmasi dengan orang yang akan ditemui tamu. Sehingga memunculkan sebuah celah dimana tamu tersebut tidak bisa dipastikan hubungan sosialnya dengan orang yang akan ditemui di wilayah Duri *field*.
- f. Kartu tanda pengenalan (*badge*); ada beberapa macam kartu tanda pengenalan yang dikeluarkan oleh PT.CPI yang pernah di jelaskan pada bab sebelumnya yang antara lain;
  - *Badge* pegawai PT. CPI, berbeda dengan *badge* pegawai BP. *Badge* ini di keluarkan oleh HR PT.CPI yang ditandatangani oleh GM HR.
  - *Badge* Pegawai BP/ Perusahaan Kontraktor, dikeluarkan bilamana perusahaan tersebut memiliki kontrak kerja dengan PT.CPI di area operasinya.
  - *CPI Visitor Pass*, dikeluarkan oleh pihak *security* dengan rekomendasi oleh manajemen PT.CPI.
  - *Facility Entry Pass*, adalah *badge* yang digunakan oleh pekerja pada suatu fasilitas yang terdapat di Duri *field*.
  - *Facility Visitor Pass*, adalah *badge* yang digunakan oleh tamu dari sebuah fasilitas untuk memasuki fasilitas tersebut.

*Badge* ini berfungsi untuk memastikan adanya kepastian hubungan sosial antara pihak perusahaan dengan orang-orang yang akan memasuki wilayah Duri *field*. *Badge* ini salah satu alat yang digunakan untuk menetapkan kriteria orang yang akan memasuki wilayah Duri *field* dan fasilitas tertentu di dalam Duri *field*.
- g. *Vehicle pass*; merupakan kartu izin masuk untuk sebuah kendaraan ke dalam Duri *field*. *vehicle pass* ini dikeluarkan oleh pihak *security* atas rekomendasi seseorang yang memiliki otoritas atau yang berwenang. Biasanya *vehicle pass* diberikan kepada kendaraan operasional BP. Dengan adanya *vehicle pass* ini memunculkan sebuah persepsi bahwa tidak sembarang kendaraan dapat memasuki Duri *field*. Untuk kendaraan tamu agar dapat memasuki wilayah Duri *field* setelah mendapatkan izin dari pihak *security* PT.CPI akan

diberikan *visitor vehicle pass* dimana pada *visitor vehicle pass* terdapat nomor masuk kendaraan lalu nomor *gate* yang dilalui. Dengan adanya kartu *pass* ini akan memudahkan fungsi pengawasan dan keberadaannya akan diketahui bila ia menggunakan *visitor vehicle pass* ini karena ia harus keluar pada *gate* yang sama.

## Prosedur pelaksanaan *access control* di wilayah Duri Field

### Masalah identifikasi

Identifikasi adalah hal yang penting dalam proses penerapan *access control* karena terkait dengan upaya untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan punya alasan yang absah, terkait dengan operasi dan bisnis, mendapatkan izin yang dapat memasuki wilayah Duri field dan fasilitas di dalamnya. Dengan kata lain identifikasi terkait dengan upaya pengawasan. Identifikasi untuk wilayah Duri field dibedakan menjadi 2, identifikasi ketika memasuki wilayah area Duri field dan identifikasi untuk memasuki fasilitas yang ada di dalamnya.

Identifikasi untuk memasuki area Duri field;

1. Petugas *security* tidak boleh memberi izin masuk kepada seseorang tanpa identitas yang jelas.
2. Pegawai PT.CPI, BP harus mengenalkan dan memperlihatkan identitas mereka yang berupa *badge* kepada petugas *security* ketika kendaraan ketika melalui *gate* dan petugas *security* wajib memastikan identitas tersebut digunakan oleh orang yang sesuai dengan *badge* tersebut.
3. Tamu harus memperlihatkan *visitor pass* atau kartu identitas lainnya yang memiliki foto kepada petugas *security*. Kehadiran tamu harus dikonfirmasi kepada orang yang akan dikunjungi tamu tersebut, apakah benar tamu tersebut adalah tamu dia.
4. Identifikasi juga dilakukan kepada kendaraan yang masuk ke wilayah Duri Field. identifikasi kendaraan dapat dilihat dari nomor dinding kendaraan bila kendaraan tersebut adalah kendaraan operasional PT.CPI. identifikasi untuk kendaraan BP dapat dilihat dari *vehicle pass*. Petugas *security* wajib untuk memastikan *pass* tersebut masih berlaku dan digunakan oleh kendaraan yang tercantum di *pass* tersebut.

Untuk identifikasi di *gate* masuk menuju Duri field terdapat berbagai macam masalah seperti identifikasi tidak dilakukan dengan teliti karena berbagai macam alasan antara lain adanya kemacetan yang ditimbulkan

ketika dilakukan identifikasi secara teliti, atau masalah keterbatasan sarana dimana tidak adanya kanopi di setiap *gate* sehingga ketika hari panas petugas mengalami serangan panas matahari, ketika hari hujan petugas harus kehujanan untuk melakukan identifikasi.

Secara psikologis menyerahkan kartu identitas akan memberikan efek adanya ketakutan kepada seseorang karena ketika terjadi masalah maka identitas orang tersebut dapat langsung diketahui dengan data-data pribadi yang jelas. Ini semakin menanamkan sebuah persepsi adanya resiko yang tinggi bila melakukan kejahatan. Kartu identitas memberikan sebuah kepastian adanya hubungan sosial antara si pemilik identitas dengan perusahaan dan juga pada saat tamu dikonfirmasi keberadaannya kepada orang yang akan ditemui si tamu juga memberikan sebuah kepastian adanya hubungan secara sosial antara si tamu dengan orang tersebut. Dengan adanya ketidak telitian yang dilakukan pada saat identifikasi akan mengurangi upaya pengawasan dari proses *access control*, ini menyebabkan berkurangnya kemampuan proteksi dari pengamanan karena diakibatkan munculnya sebuah persepsi bahwa pemeriksaan di *gate* tidak dilakukan secara teliti jadi kemungkinan untuk memasuki wilayah Duri *field* tanpa menggunakan identitas seperti *badge* akan semakin besar. Dengan begini resiko kerugian bila melakukan kejahatan di wilayah Duri *field* akan semakin kecil.

### **Prosedur masuk wilayah Duri *field* dan fasilitas di dalamnya**

Prosedur masuk adalah tata cara ataupun proses-proses yang harus dilalui untuk memasuki wilayah Duri *field* dan fasilitas yang terdapat di dalamnya. Hal yang penting dalam prosedur masuk adanya aspek pengawasan dan pengaturan. Setiap orang yang ingin dan akan memasuki wilayah Duri *field* diberikan sebuah identitas yang berbeda tergantung pada kriteria mereka. Semisal pegawai BP menggunakan *badge* BP, pegawai PT.CPI menggunakan *badge* PT.CPI sedangkan tamu diberikan *visitor pass*. Pembedaan ini merupakan suatu bentuk pengaturan dengan diberikannya kartu identitas sesuai kriteria yang mereka miliki. *Badge* harus digunakan agar dapat diawasi sehingga muncul sebuah fungsi pengawasan.

Berikut ini adalah prosedur masuk untuk memasuki wilayah Duri *field*;

1. Terdapat aturan yang berbunyi “*No pass, No badge No entry*”
2. Pegawai PT.CPI, BP dan tamu harus menghentikan kendaraannya ketika petugas *security* memberikan aba-aba untuk berhenti sesaat sebelum memasuki Duri *field* untuk melakukan pemeriksaan.
3. Pegawai PT.CPI dan BP harus menunjukan *badge* mereka ketika di identifikasi dan juga khusus untuk kendaraan yang bukan kendaraan

operasional PT.CPI harus dilengkapi dengan *vehicle pass*. Petugas *security* wajib memastikan bahwa *badge* digunakan oleh orang yang bersangkutan dan *pass* sesuai dengan kendaraan yang tercantum di *pass*.

4. Tamu yang akan memasuki wilayah Duri *field* harus menunjukkan *badge visitor pass*nya. Bila tamu tidak memiliki *visitor pass* maka tamu tersebut harus menunjukkan kartu identitas lainnya yang memiliki foto dan semua tamu harus dikonfirmasi keberadaannya kepada orang yang akan ditemuinya, apakah benar tamu tersebut adalah tamu dia.
5. Setiap tamu yang masuk wilayah Duri *field* harus mengisi buku tamu dan meninggalkan kartu identitasnya bila ia tidak memiliki *visitor pass*.Kartu identitas dikembalikan bila ia telah keluar dari wilayah tersebut. Setiap tamu harus keluar pada *gate* yang sama ketika ia masuk.
6. Kendaraan tamu akan diberikan *visitor vehicle pass* karena kendaraan tersebut tidak memiliki *vehicle pass*. *Visitor vehicle pass* harus dikembalikan ketika kendaraan itu keluar dari wilayah Duri *field*. Setiap tamu harus keluar pada *gate* yang sama ketika ia masuk.
7. Semua kendaraan masuk harus diperiksa pada level 2.
8. Barang masuk harus diperiksa apakah jenis dan jumlah barangnya sesuai dengan dokumen-dokumen yang menyertainya.
9. Kendaraan yang akan mengantar barang masuk ke Duri *field* tidak memiliki *vehicle pass* maka harus memiliki izin khusus dari senior company representative *security* yang bertanggung jawab atas Duri *field*. Izin ini diberitahukan melalui email ke PM PT. DMG dan akan diberitahukan kepada petugas *security* di lapangan. Kendaraan tersebut harus di berikan *visitor vehicle pass*.

Prosedur jalan masuk untuk *gate* memiliki celah dengan adanya beberapa proses yang dilewatkan dan dilakukan secara tidak optimal. Semisal pemeriksaan dan identifikasi untuk pegawai PT.CPI yang menggunakan kendaraan operasional PT.CPI dilakukan dengan tidak teliti dan pada level satu. Terkadang kendaraan dibiarkan lewat begitu saja. Pada kasus *gate* 125 tidak terdapat *visitor vehicle pass* sehingga kendaraan yang tidak memiliki *pass* dan mempunyai izin khusus tidak diberikan *visitor vehicle pass*.

Prosedur masuk untuk fasilitas vital yang berada di wilayah Duri *field*;

1. Semua orang yang akan memasuki fasilitas vital harus memiliki *badge*, baik yang dikeluarkan PT.CPI maupun BP dan *visitor pass*. Orang-orang yang tidak memiliki identitas yang disebutkan diatas tidak diizinkan masuk kedalam fasilitas vital.
2. Setiap pegawai yang bekerja didalam fasilitas harus mengisi daftar hadir yang terdapat di pos penjagaan pintu depan fasilitas

3. Semua tamu harus mengisi *log book* tamu dan *security* dan *facility owner* wajib memberikan penerangan perihal fasilitas dan persyaratan beserta aturan yang terdapat didalam fasilitas tersebut.
4. Semua pegawai yang bekerja di dalam fasilitas tersebut harus menukarkan *badgenya* dengan *badge facility entry pass*. Sedangkan tamu harus menukarkan *badgenya* dengan *visitor facility entry pass*.
5. Petugas *security* harus memeriksa semua orang yang akan memasuki fasilitas vital tersebut termasuk kendaraannya
6. *Facility entry pass* dan *visitor facility entry pass* harus dikembalikan pada saat keluar dari fasilitas.

Prosedur masuk untuk fasilitas vital dilakukan dengan baik dan ketat karena berhubungan dengan keselamatan dan keamanan kerja.

Dari penjabaran diatas pengaturan jalan masuk dan pengawasannya tidak hanya dilakukan kepada manusia saja, tetapi juga kepada kendaraan dan barang yang masuk. Dengan adanya proses yang harus dilalui untuk memasuki wilayah *Duri field* dan fasilitasnya akan memunculkan sebuah persepsi secara psikologis adanya sebuah penjagaan yang ketat karena untuk memasuki wilayah tersebut harus melalui tahap-tahap pengaturan, pengawasan dan penjagaan. Proses jalan masuk ini juga meminimalisir kesempatan terjadinya kejahatan. Jadi, prosedur jalan masuk semakin mempertegas bahwa *access control* tidak hanya terbatas pada aspek fisik dan teknis saja tetapi juga terdapat muatan aspek sosial dan aspek psikologis.

Dengan adanya kasus berupa adanya beberapa proses yang dilewatkan dan dilakukan secara tidak optimal memunculkan celah pada proses *access control*. Dengan adanya proses yang dilewatkan atau dilakukan secara tidak optimal akan memunculkan sebuah kesempatan untuk melakukan kejahatan karena proses pengaturan, pengawasan dan penjagaan tidak tercipta secara optimal. Ini menyebabkan munculnya sebuah persepsi secara psikologis bahwa penjagaan dilakukan tidak seketat yang dibayangkan sehingga resiko melakukan kejahatan itu sangat kecil. Dengan demikian *access control* kehilangan kemampuan proteksinya secara psikologis.

### **Inspeksi orang, kendaraan dan barang yang masuk dan keluar**

Inspeksi merupakan salah satu bentuk pengawasan dan pengecekan agar barang-barang, orang, dan kendaraan yang tidak dibenarkan masuk ke dalam wilayah *Duri field*. Pemeriksaan difokuskan mencari barang-barang terlarang/membahayakan seperti bom, senjata api, senjata tajam, dsb, yang mengganggu/mengancam operasional. Inspeksi ini dalam teori 25 teknik pencegahan kejahatan Clarke termasuk ke dalam strategi *entry/exit*



*screening*. Inspeksi yang dilakukan dalam proses *access control* di Duri *field* dan fasilitasnya;

1. Semua kendaraan yang keluar masuk harus di inspeksi dengan kaca pencari bom dan level pemeriksaan pada level 2.
2. Setiap orang wajib menunjukan barang-barang yang ia bawa bila diminta oleh petugas *security*.
3. Fokus pemeriksaan adalah untuk mencari barang-barang terlarang dan membahayakan seperti bom, senjata api, senjata tajam yang dapat mengganggu dan mengancam operasional.
4. Untuk memasuki wilayah vital orang diperiksa dengan metal detector.

Proses inspeksi untuk wilayah *gate* tidak berjalan dengan baik karena pemeriksaan terkadang tidak menggunakan pemeriksaan level 2 dan juga penggunaan alat seperti metal detector dan kaca pencari bom tidak dipergunakan secara konsisten. Untuk inspeksi memasuki wilayah fasilitas vital pemeriksaan dilakukan pada level 2, namun penggunaan alat inspeksi seperti yang disebutkan sebelumnya juga tidak dipergunakan secara konsisten. Hanya di gudang bahan peledaklah alat-alat itu digunakan secara konsisten.

Langkah-langkah inspeksi ini sebenarnya hanya terfokus mencari barang-barang atau benda berbahaya saja. Inspeksi ini tidak memiliki kemampuan mencari orang-orang yang berniat tidak baik yang masuk kedalam wilayah Duri *field*. sebenarnya langkah-langkah dari inspeksi ini juga memunculkan sebuah persepsi secara psikologis bahwa daerah tersebut dijaga dengan ketat, sehingga tidak mudah untuk melakukan tindak kejahatan di dalam wilayah tersebut. Namun dengan adanya kelalaian dan ketidak konsistenan dalam melakukan inspeksi di *gate* memunculkan persepsi bahwa wilayah ini tidak terlalu di jaga dengan ketat. Orang dengan kendaraan yang memiliki *pass* dan *badge* dapat masuk membawa alat-alat yang dilarang dan berbahaya. Disini pentingnya inspeksi juga harus menangkal agar orang-orang yang berniat jahat tidak masuk ke dalam wilayah Duri *field*. Muatan aspek sosial pada proses inspeksi ini lebih terlihat adanya kondisi pengakuan bersama pada regulasi atau aturan yang berlaku di wilayah tersebut.

### **Prosedur kontrol keluar barang-barang di wilayah Duri *field***

Dalam proses penerapan *access control* selain melakukan pengaturan dan pengawasan pada jalan masuk juga harus melakukan hal yang sama pada jalan keluar. Dengan terdapatnya *asset* jutaan dollar yang berada di dalam area Duri *field* menutup kemungkinan adanya barang yang keluar tanpa ada otorisasi yang jelas menjadi suatu hal yang vital. Prosedur pemeriksaan barang keluar yang ada antara lain;

- a. Lakukan pemeriksaan dengan Level 2.
- b. Semua barang-barang tanpa kecuali harus memiliki dokumen lengkap (*Cargo manifest, general order/GO*) yang masih berlaku (sesuai dengan nama barang, jumlah, tanggal, dan pemberi otoritas, dsb). Perhatikan keaslian/ keabsahan nama dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut.
- c. Tahan untuk sementara barang-barang yang tidak sesuai dengan dokumen. Berikan surat tanda penahanan barang kepada yang bersangkutan dan segera lakukan kordinasi dengan, supervisor, atau *sector commander* dan diteruskan kepada bagian investigasi.

Untuk proses pemeriksaan barang keluar dari *gate* memiliki sebuah permasalahan yang mengarah kepada kompetensi personil penjagaan yang ada di *gate*. Persoalan ini adalah adanya ketidaktahuan jenis-jenis barang yang ada di wilayah Duri *field* sehingga ketika melakukan pemeriksaan petugas *security* sulit untuk mengenali jenis barang. Biasanya mereka hanya memperhatikan jumlah barang saja, apakah sesuai dengan yang ada pada *cargo manifest*. Untuk pemeriksaan barang keluar di *warehouse* petugas *security* dibantu oleh seorang pegawai BP yang mempunyai kontrak kerja sama dengan PT.CPI di *warehouse* 125. Pegawai BP ini adalah orang yang mengerti dan mengetahui jenis barang. Namun masalahnya barang yang keluar dari Duri *field* tidak hanya berasal dari *warehouse* 125 saja tetapi juga dari fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam Duri *field*.

Pemeriksaan/kontrol barang keluar menjadi sangat penting karena dengan adanya kontrol keluar barang-barang maka akan memunculkan sebuah persepsi bahwa wilayah ini dijaga dengan ketat walaupun berhasil masuk namun pada saat keluar juga harus melalui proses pemeriksaan. Dengan kata lain walaupun orang berhasil membongkar sebuah *asset* tanpa ketahuan tapi *asset* itu belum tentu dapat keluar karena setiap barang keluar harus memiliki sebuah *cargo manifest* yang ditandatangani oleh orang-orang yang memiliki otoritas. Pada kenyataannya dengan adanya celah dimana kompetensi personil yang menjaga *gate* tidak mencukupi untuk melakukan pengenalan jenis barang akan membuat sebuah kesempatan orang dapat meloloskan barang yang jenisnya tidak sesuai dengan *cargo manifest*. Aspek sosialnya adalah adanya sebuah aturan yang disepakati bersama bahwa sebuah barang dapat keluar dari Duri *field* harus memiliki sebuah *cargo manifest* yang di otorisasi oleh orang yang memiliki kewenangan dan otoritas untuk mengeluarkan barang tersebut. Dengan adanya sebuah *cargo manifest* maka disitu terdapat fungsi pengaturan barang mana yang dapat keluar dari Duri *field*. Pemberi otorisasi bahwa barang itu dapat keluar adalah orang yang menentukan kriteria barang yang

dapat keluar. Sedangkan pengecekan barang terhadap kesesuaian dengan *cargo manifest* adalah sebuah fungsi pengawasan.

### **Prosedur memasuki fasilitas untuk melakukan pekerjaan tidak rutin**

*Access control* bertujuan untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan punya alasan absah, terkait dengan operasi dan bisnis yang dapat memasuki Duri *field* dan fasilitas yang terdapat di Duri *field*. Pada pintu masuk Duri *field*, terdapat tulisan “*No Pass No badge No Entry*”. hanya orang-orang yang berkepentinganlah yang dapat masuk. Di wilayah duri *field* semua pegawai telah ditentukan wilayah mana ia bekerja dan fasilitas apa yang ia bisa masuki terkait dengan pekerjaan rutinnnya. Sehingga pegawai PT. CPI dan pegawai BP tidak dapat measuki sebuah fasilitas yang bukan wilayah tempat ia bekerja rutin tanpa seizin FO. Seperti tim PG&T tidak dapat memasuki area CGS begitu saja. Bila ada pekerjaan yang tidak rutin yang akan dikerjakan di suatu fasilitas seperti seperti perbaikan atau penukaran sebuah alat di CGS oleh tim *support* haruslah membutuhkan *Work Permit*, sehingga tim *support* yang akan melakukan pekerjaan tidak rutin didalam fasilitas mendapat izin masuk untuk bekerja. *General Work Permit* merupakan sarana dimana penanggung jawab operasi fasilitas (FO) memberikan izin kepada petugas ( Pegawai PT. CPI/BP) untuk melakukan pekerjaan tidak rutin di suatu tempat kerja didalam fasilitas yang ia kelola.

Pada dasarnya GWP ini adalah sebuah infrastuktur untuk memastikan pekerjaan tidak rutin disebuah fasilitas dapat dilakukan secara selamat, jadi GWP lebih terfokus kepada keselamatan dan keamanan bekerja maka dari itu GWP merupakan bagian dari FSWP. Ini juga terlihat dari tidak dicantumkannya *security* kedalam daftar pelaksana proses untuk proses GWP. Kaitannya dengan proses penerapan *access control* adalah GWP merupakan penentuan kriteria orang yang dapat memasuki dan melakukan pekerjaan tidak rutin kedalam sebuah fasilitas. Dengan adanya GWP muncul sebuah persepsi bahwa tidak sembarangan orang dapat memasuki sebuah fasilitas untuk melakukan pekerjaan tidak rutin. Sebenarnya dengan adanya GWP kesempatan para pelaku kejahatan potensial yang berasal dari dalam semakin kecil karena untuk memasuki wilayah sebuah fasilitas yang bukan tempat ia bekerja membutuhkan GWP , juga untuk melakukan pekerjaan yang tidak rutin seperti halnya membongkar sebuah *asset* yang terpasang membutuhkan sebuah GWP. GWP selain berfungsi untuk menentukan kriteria juga dapat menjadi alat untuk pengawasan seperti contoh, ketika seorang FO melihat adanya pekerjaan tidak rutin didalam fasilitas yang ia kelola maka ia bisa mempertanyakan GWP dari pekerjaan tersebut.

## Kesimpulan

Terkait dengan masalah penerapan *access control* untuk wilayah Duri *field* dapat dikatakan bahwa *access control* yang diterapkan tidak hanya terbatas pada aspek fisik saja tetapi juga mencakup aspek psiko-sosial juga. Ini terlihat bahwa *access control* yang diterapkan tidak hanya terbatas pada upaya pengendalian jalan masuk dengan mengandalkan kemampuan halang rintang yang bersifat fisik saja untuk mencegah pelaku kejahatan potensial untuk masuk kedalam wilayah yang dijaga seperti portal, rambu, pos penjagaan, dan alat-alat lainnya, tetapi juga semua bentuk halang rintang, seperti dengan adanya peraturan, pendefinisian terhadap ruangan, *setting* ruangan, SOP, petunjuk pelaksanaan, serta pengaturan dan pengawasan. *access control* dapat dilihat sebagai sebuah sarana mengendalikan atau mengatur siapa dan apa saja yang diperkenankan untuk masuk dan keluar dari sebuah wilayah yang dijaga dengan penetapan sebuah kriteria. *Access control* juga dapat mengawasi mobilitas, pergerakan dan lalu lalanganya orang atau barang terhadap suatu wilayah yang dijaga. Yang menjadi penting dari semua itu bahwa *access control* memiliki kemampuan memproteksi baik secara fisik maupun psikologis. Aspek fisik dan teknik serta penggunaan alat-alatnya pada konsep *access control* tidak akan berjalan secara optimal bila tidak terdapat aspek sosial dan aspek psikologis.

## Saran

1. SOP adalah kebijakan perusahaan yang wajib dipenuhi dan diakui oleh pihak yang berkepentingan di PT.CPI. SOP *access control* yang ada di PT. CPI masih menjadi sebuah bagian dari FSWP, sedangkan FSWP adalah sebuah SOP untuk bekerja dengan selamat. Jadi proses *access control* masih dipandang sebagai sebuah sarana pendukung untuk terciptanya keselamatan dan keamanan bekerja. Dalam tujuannya, jelas *access control* yang dimaksud berfungsi untuk memastikan bahwa hanya orang-orang yang berwenang dan punya alasan absah yang dapat memasuki wilayah operasi PT.CPI. Ini merupakan sebuah fungsi pengawasan dari *access control*, namun dalam SOP ini tidak mencantumkan fungsi pengaturan siapa saja yang boleh/ diizinkan masuk kedalam wilayah PT.CPI. Dalam SOP ini tidak mencantumkan kriteria dan alasan yang absah apa dan siapa saja yang berhak masuk. Dalam proses ini tidak dijelaskan bagaimana prosedur untuk mendapatkan *badge* pegawai PT.CPI, prosedur untuk pembuatan dan mendapatkan *badge* pegawai BP dari PT.CPI, prosedur untuk

mendapatkan *visitor pass*, prosedur untuk mendapatkan *vehicle pass*, yang notabene adalah alat untuk menentukan kriteria memasuki wilayah PT.CPI. Maka dari itu SOP acces control juga harus mencakup fungsi pengaturannya. proses *access control* pada SOP ini hanya berlaku untuk fasilitas operasi yang berada pada area PT.CPI dengan kata lain proses ini tidak mencakup proses *access control* untuk memasuki area PT.CPI itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan sebuah SOP *access control* yang benar-benar komperhensif, yaitu mencakup fungsi pengaturannya dan mencakup fungsi pengawasannya yang tercantum dalam tujuannya dan prosesnya, ruang lingkup yang lebih luas, infrastruktur dan dokumen terkait dengan akses kontrol untuk pendokumentasian, Serta kewenangan dan kewajiban serta kompetensi yang harus dimiliki semua orang yang terlibat dalam proses ini dicantumkan dengan lengkap.

2. Saran berikutnya adalah soal peralatan dan penggunaan peralatan yang tidak dipergunakan secara konsisten. Ini terkait dengan adanya sarana-saran fisik yang tidak lengkap di beberapa pos penjagaan gerbang utama dan penggunaan sarana fisik yang dilakukan secara tidak konsisten, sehingga ini akan memunculkan sebuah persepsi bahwa wilayah tersebut tidak dijaga dengan ketat dan juga akan memunculkan sebuah kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan di dalam wilayah *duri field*. Sebaiknya di semua pos *access control* terutama pada pos di gerbang utama harus di beri kanopi, agar pada saat cuaca panas atau hujan tidak menjadi faktor penghalang dan penghambat untuk melakukan pemeriksaan, identifikasi, dan inspeksi secara teliti, baik dan benar. Semua sarana dan peralatan sebainknya sama pada setiap pos penjagaan terutama pos gerbang utama. Semua sarana yang hilang dan tidak ada sebaiknya diadakan kembali, seperti *visitor vehicle pass* dan telephone yang tidak ada di *gate 125*, serta sarana lainnya. Ketiadaan saran ini dapat menghambat proses penerapan *access control*. Selain itu peralatan yang terkait dengan proses *access control* sebaiknya dipergunakan dengan konsisten, sehingga akan memunculkan sebuah persepsi bahwa wilayah itu dijaga dengan ketat.
3. Penetapan jumlah personil dan kompetensi personil untuk mendukung proses penerapan *access control*. Jumlah personil yang terlalu banyak terkadang juga tidak efisien dalam proses penerapan *access control*. Ini terlihat dari kasus dimana walaupun yang menjaga *gate 116, 117, 125*, itu berjumlah 6 orang pada setiap *gate*, namun pada dasarnya yang efektif bekerja melaksanakan penjagaan adalah 2 sampai 3 orang saja, karena yang lainnya beristirahat, ini dikarenakan mereka menerapkan sistem kerja bergilir untuk melakukan penjagaan. Mereka menerapkan sistem ini karena adanya kelelahan yang ditimbulkan karena jam kerja

mereka yang 12 jam dan cuaca panas yang harus mereka hadapi. Bila sarana kanopi dapat direalisasikan maka sebaiknya jumlah personil yang ada harus dimaksimalkan untuk melakukan penjagaan terutama ketika jam-jam sibuk. Sehingga pengaturan dan pengawasan dilakukan dengan baik dan teliti. Selain masalah di atas kompetensi petugas *security* harus ditingkatkan terutama untuk pengetahuan terhadap jenis-jenis barang produksi dan barang-barang pendukung produksi yang biasa keluar masuk dari duri *field*, ini bisa dilakukan dengan mengadakan sebuah training untuk petugas *security*.

### Daftar Pustaka

- Boba, Rachel. (2005). **Crime Analysis and Crime Mapping**. Sage Publication, inc: California.
- Chevron. (2006). **Fundamental Safe Work Practices**. PT. Chevron Pacific Indonesia.
- Clarke, Ronald V and John Eck. (2003). **Become A Problem Solving Crime Analysis**. London: Jill Dando Institute of Crime.
- Clarke, Ronald V. (Ed). (1997). **Situational Crime prevention: Successful Case Studies (2nd edition)**. New York: Harrow and Hesston.
- Dermawan, Moh. Kemal. (1994). **Strategi Pencegahan Kejahatan**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gallery, Shari Mendelson (Ed). (1986). **Physical Security, Reading from Security Management Magazine**. Boston: Butterworths.
- Hidensohn, Frances. (1989). **Crime and Society**. London: Macmillan Press.
- Jeffery, C Ray. (1977). **Crime Prevention Trough Environmental Design**. Baverly Hills: Sage Publication, Inc.
- Muncie, Et. al., (Ed). (1996). **Criminological Perspectives a Reader**. London: Sage Publication.
- O'Block, Robert. (1981). **Security and Crime Prevention**. St. Louis: The C.V. Mosby Company.
- Santoso, Julianto. (2006). **Penerapan konsep pengendalian jalan masuk (access control) sebagai konsep sistem keamanan (studi tentang pengamanan PT "X" di Jakarta)**. Depok: FISIP UI, Dept. Kriminologi, Prog. Pasca Sarjana.

- Wels, Brandon and David P. Farrington, (Ed). (2006). **Preventing Crime, What Works for Children, Offenders, Victims and Places**. New York: Springer.
- Clarke, Ronald V. (1983). **Situational Crime Prevention: Its Theoretical Basis and Practical Scope**. *Journal Crime and Justice*, Vol. 4. The University of Chicago Press . 1983. [online]  
<http://www.jstor.org/stable/1147510>
- Authentication, Authorization, and Access control. [online]  
<http://httpd.apache.org/docs/1.3/howto/auth.html#intro>
- Inova, user's guide, CSG Security Inc, 1998. [online]  
[www.hanoi-sse.com/site1/documents/doc.../3-innova-master-for-windows](http://www.hanoi-sse.com/site1/documents/doc.../3-innova-master-for-windows)